DIDASKO
Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN (STAK) DIASPORA WAMENA, PAPUA

Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2026, hal: 163-177)
Web STAK DIASPORA Wamena: http://stakdiaspora.ac.id
Web DIDASKO: https://e-journal.stakdiaspora.ac.id/index.php/didasko/index

Membangun Kesadaran Berpolitik yang Sehat Berdasarkan Pendidikan Agama Kristen di Indonesia Dengan Mengembangkan Teori Abraham Kuyper

Yoell Ervandy[1], Nur Budi Santosa[2], Adi Ehut Lande[3]
Sekolah Tinggi Teologi Intheos Surakarta[1,2,3]
yoellervandy01@gmail.com, nurbudisantosa@sttintheos.ac.id, adiehutlande@sttintheos.ac.id

Abstract: *Historically, many Christians have been involved in the political world, yet they still hold unhealthy political views, as evidenced by the rampant corruption, collusion, and nepotism. The problem is that Christian Religious Education (PAK) has not been maximally effective in building healthy political awareness in: families, churches, schools, and communities. Previous research in Indonesia discusses political attitudes and Kuyper's views on freedom of worship, but has not yet integrated Abraham Kuyper's Sphere Sovereignty theory with Christian Religious Education (CRE) to build political awareness in society. This research aims to examine the relationship between Sphere Sovereignty and spiritual regeneration according to Kuyper, then integrate it with PAK to encourage critical, ethical, democratic, and responsible political participation based on the Bible in the context of a pluralistic Indonesia. This research uses the library study method, by collecting data and analyzing literature such as books, journals, and previous research. The study results show that Sphere Sovereignty limits the authority of the realm of life, so politics does not have absolute rights, while regeneration is God's personal work for humanity. PAK is present to bridge the two through conceptual reconstruction in the division of roles of the family, school, church, and society to build a democratic, critical, tolerant, and responsible political awareness. Based on this, the novelty of this research lies in the contextualization of Kuyper's theory within the realm of PAK in Indonesia as a foundation for political awareness.*

Keywords: *Christian Education, Sphere Sovereignty, Abraham Kuyper, Political Consciousness.*

Abstrak: Secara historis banyak orang Kristen terlibat dalam dunia politik, namun masih memiliki pandangan politik yang kurang sehat, terbukti dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Permasalahannya, Pendidikan Agama Kristen (PAK) belum maksimal dalam membangun kesadaran berpolitik yang sehat di: keluarga, gereja, sekolah dan lingkungan. Penelitian terdahulu di Indonesia membahas mengenai sikap politik dan pandangan Kuyper dalam kebebasan beribadah, tetapi belum diintegrasikan dengan teori *Sphere Sovereignty (ranah kehidupan)* Abraham Kuyper dengan PAK untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan *Sphere Sovereignty* dan regenerasi rohani menurut Kuyper, lalu diintegrasikan PAK guna mendorong pasrtisipasi politik yang

kritis, etis, demokratis, dan bertanggung jawab berdasarkan Alkitab dalam konteks Indonesia yang majemuk. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dengan cara mengumpulkan data dan menganalisa literatur seperti: buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukan *Sphere Sovereignty* membatasi otoritas ranah kehidupan, sehingga politik tidak memiliki hak mutlak, sedanagkan regenerasi merupakan karya Allah secara pribadi bagi manusia. PAK hadir untuk menjembatani keduanya melalui rekontruksi konseptual dalam pembagian peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat untuk membangun kesadaran berpolitik yang demokratis, kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, maka kebaruan penelitian kali ini terletak pada kontekstualisasi teori Kuyper dalam ranah PAK di Indonesua sebagai dasar kesadaran berpolitik.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Kristen, *Sphere Sovereignty,* Abraham Kuyper, Kesadaran Politik.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya banyak orang Kristen khususnya di Indonesia sudah banyak terjun dan terlibat aktif dalam dunia politik. Ada beberapa contoh dalam sejarah tokoh Kristen yang duduk dan memegang peranan penting dalam politik bagi bangsa Indonesia, yaitu: Dr. Mulia, J.P. Risakotta, Mr. Amir Sjarifudin,W. Pattiasina, Abednego, C. Frans, Dr. Leimena, dan Soewidji adalah nama yang memiliki peranan penting di dalam ranah politik Indonesia baik sebelum maupun pasca kemerdekaan (Hakh, 2018). Hal ini menunjukan bahwa sejak zaman dahulu, orang Kristen sudah menjadi tonggak dan dasar bagi negara, sehingga bukan hal yang asing untuk terlibat aktif didalamnya. Namun, masih ada beberapa orang Kristen dalam dunia politik belum mampu memaksimalkan potensi dan minim dalam kesadaran etis. Itu terbukti dengan adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan yaitu: merengggut nyawa seseorang, tindakan korupsi dan manipulasi data dari sektor energi yang sudah menjadi budaya di Indonesia (Siahaan, 2025). Persoalan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, namun berakar dalam pembentukan sejak dini. Hal ini terjadi akibat Pendidikan Agama Kristen yang dimulai dari keluarga, sekolah, dan gereja belum maksimal, sehingga mereka tumbuh tanpa fondasi etis dan kritis (Malino et al., 2024). Padahal, ranah tersebut membentuk cara pandang seseorang memahami kuasa sebagai tanggung jawab di bawah otoritas Allah. Karena itu, Pendidikan Agama Kristen mendesak supaya seseorang memiliki pembentukan kesadaran politik yang sehat sejak dini, sebelum terjun ke dunia politik.

Penulis memetakan penelitian terdahulu menjadi dua kelompok, yang pertama membahas PAK dan sikap berpolitik. Pendidikan berperan untuk memberikan gambaran bagi masyarakat bagaimana cara bersikap dalam berpolitik, aktif dalam kegiatan politik, dan tidak anti terhadap dunia politik (Djoys Anake Rantung, 2017). Namun pembahasannya belum menghasilkan pola kehidupan berpolitik yang sehat secara terukur. Penelitian lain membahas mengenai sikap berpolitik yang berintegritas dan penuh kasih, namun sasarannya adalah orang yang sudah terjun ke dalam dunia politik (Djoys Anake Rantung, 2017). Peran politik dan kaum imam juga di soroti, namun kembali sasarannya bukanlah jemaat luas. Luas (Zed, 2014). Ketiganya masih belum menjelaskan tentang bagaimana kesadaran berpolitik yang sehat dapat dibentuk dari sejak dini di keluarga, gereja, ataupun sekolah.

Kelompok kedua membahas mengenai pemikiran yang dimiliki oleh Abraham Kuyper bila di terapkan di Indonesia. Penelitian terdahulu memakai *Sphere Sovereignty* untuk

mengembalikan pandangan normatif pemimpin politik dan mengkritisi kebebasan beribadah, namun fokusnya masih terhadap kebijakan negara dengan kebebasan beragama, bukan pada pendidikan dan pembentukan kesadaran berpolitik (Zed, 2014). Dari pengelompokan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa ada kesenjangan yang terjadi dari kajian PAK dan politik yang belum memakai kerangka *Sphere Sovereignty,* dan kajian *Sphere Sovereignty* yang belum menyentuh PAK. Dengan demikian, belum ada penelitian yang mengintegrasikan keduanya di Indonesia, sehingga ruang penelitian masih terbuka dan bisa dikembangkan secara luas.

Dari kesenjangan inilah peneliti berusaha untuk mengkaji dan mengintegritaskan teori yang dikemukakan oleh Abraham Kuyper yaitu *Sphere Sovereignty* ke dalam pendidikan agama Kristen. Kontribusi yang diberikan adalah merumuskan model konseptual yang dilakukan di keluarga, gereja, dan sekolah, berdasarkan perannya masing-masing menurut prinsip *Sphere Sovereignty* agar dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran berpolitik yang kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam realitas sosial-politik Indonesia yang majemuk. Sehingga di harapkan muncul sebuah rumusan yang dapat di impikasikan bagi pengembangan materi dan pendekatan pendidikan agama Kristen yang dapat mendorong pasrtisipasi politik yang bertanggung jawab, kritis, namun masih tetap berlandaskan iman.

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau yang biasa disebut *library research.* Peneliti menggunakan bahan primer karya Abraham Kuyper yaitu *Our Program* dan *Lectures on Calvinism*, dan bahan sekunder yaitu buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu tentang pemikiran Kuyper yang relevan dan kredibel. Penelitian ini dimulai dengan menemukan ide umum tentang penelitian terkait, kemudian mencari informasi yang mendukung topik tersebut. Informasi yang terkumpul kemudian dipertegas baik diperluas maupun dipersempit, dan diorganisasikan melalui sumber penelitian yang ada baik sumber primer maupun sekunder (Zed, 2014). Sumber penelitian kemudian di reorganisasi mana yang paling sentral dan dibuat catatan penelitian supaya dapat direview dan dianalisis secara kritis, sehingga gagasan yang terkumpul dapat membantu dan mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sphere Sovereignty (Ranah Kehidupan) Abraham Kuyper Sebagai Landasan Teologis

Sebagai dasar dari penelitian, penting untuk melihat sudut pandang dan pola pemikiran Abraham Kuyper dalam hal politik, dirumuskan dalam karyanya yang berjudul *Our Program* dan *Lectures on Calvinism.* Secara jelas Kuyper tidak menolak setiap perlawanan terhadap penguasa, sebab revolusi dipandang sebagai cara untuk memulihkan negara. Namun prinsip revolusi Prancis berupaya untuk merubah tatanan dan melakukan klaim bahwa manusialah yang berdaulat (Kuyper et al., 2015). Menurut Kuyper, kedaulatan tertinggi hanya dimiliki oleh Allah, sehingga otoritas lain termasuk pemerintahan bersifat terbatas. Karena itu, prinsip Kuyper memberikan batasan pada otoritas sebuah negara, supaya kekuasaan politik tidak dipandang sebagai otoritas yang mutlak.

Revolusi sebuah negara pada hakikatnya bukanlah untuk meniadakan kedaulatan Tuhan. Tidak ada manusia, hukum, pemerintahan, atau orang tua sekalipun yang berkuasa

secara mutlak. Kondisi/situasi memerlukan penguasaan penuh pada ciptaan, dan segala sesuatu ada dalam kendali Allah sebagai sang Pencipta (Kuyper et al., 2015). Sebab pemerintahan sendiri muncul dalam konteks kejatuhan kedalam dosa, sebagai sarana untuk membatasi dampak dosa dan menjaga kehidupan bersama (Kuyper, 1898). Dengan demikian, pemerintahan muncul karena kasih karunia Allah, dan bukan karena otoritasnya sendiri.

Dari dasar itu, maka lahirlah prinsip *Sphere Sovereignty* yang menerangkan bahwa kekuasaan dalam kehidupan manusia bukan pemberian dari pemerintahan manusia. Karena kasih karunia Allah, setiap ranah kehidupan seperti politik, pendidikan, budaya, atau bahkan pemerintahan, bersumber langsung dari Allah dan setiap ranah perlu berdiri berdampingan (Kuyper et al., 2015). Karena itu, negara tidak berdiri diatas ranah-ranah lain, melainkan menghormati batas kewenangannya, terutama mengormati sumber dari kehidupan yaitu Allah (Kuyper, 1898). Meski demikian, negara tetap harus menjaga setiap ranah yang ada supaya tetap saling menghormati batas yang ada, melindungi masyarakat, dan menanggung beban bersama dalam kehidupan berbangsa.

Prinsip *Sphere Sovereignty* juga mengatur antara relasi kehidupan negara dan agama. Kuyper merumuskan bahwa pemerintah perlu untuk menghormati kebebasan gereja untuk berada dalam ranah nya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak manapun, sementara gereja pun perlu dibatasi dalam kedaulatan pribadi yang berkaitan dengan hati nurani warga gereja (Kuyper, 1898). Inilah bentuk penerapan nyata dari *Sphere Sovereignty* dalam konteks agama dan negara. Sehingga gereja dan negara dapat berdiri berdampingan dan saling menghormati prinsip kelembagaan di waktu yang sama.

Disisi lain, Kuyper juga memiliki pandangan mengenai paham politik sebuah negara. Di mana dia lebih cenderung memilih kekuasaan yang terbagi dan dikontrol secara bersamaan, ketimbang kekuasaan negara yang terpusat dan tunggal (Kuyper, 1898). Sehingga Kuyper lebih memilih sistem republik, daripada negara dengan bentuk monarki. Ini merupakan peluang jika ingin menerapkan pemikiran Kuyper di negara Indonesia yang notabene juga berbentuk republik. Sehingga, pemahaman politik Kuyper dapat diterapkan di Indonesia, dengan memperhatikan kehidupan orang Kristen dalam dunia politik.

Selain bagi kehidupan bernegara, *Sphere Sovereignty* juga dapat diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya pada Pendidikan Agama Kristen. Kuyper menjelaskan bahwa sekolah hanyalah sebuah instrumen pendukung pendidikan, sebab pendidikan yang sesungguhnya berada dalam ranah keluarga yaitu orang tua, gereja, saudara, masyarakat, sejarah bangsa, hingga Allah yang mengilhami secara langsung jiwa anak-anak (Kuyper et al., 2015). Karena itu, setiap ranah dalam pendidikan meiliki tugasnya masing-masing. Maka, setiap ranah dapat menopang satu dengan yang lain, dan semua tetap bersandar kepada Allah sebagai pemilik otoritas tertinggi.

Celah Teoritis dalam Pemikiran Kuyper

Pengembangan paham dan etika politik Kuyper lahir dari konsep doktrin kelahiran baru atau yang biasa disebut regenerasi. Tetapi dia tidak mengembangkan etika politiknya secara sistematis melalui kurikulum pendidikan sipil maupun proses pertimbangan publik. Regenerasi dapat dipahami sebagai persatuan mistis dengan Kristus yang kemudian bergerak dalam diri manusia melalui karya Roh Kudus, yang menghasilkan sebuah pembaharuan kehidupan (van Vlastuin, 2021). Oleh sebab itu, perspektif baru dalam seluruh aspek kehidupan terjadi bukan

karena daya upaya manusia, namun adanya relasi dengan Kristus yang menjadi pusat dan pemilik kedaulatan dalam seluruh ranah kehidupan.

Regenerasi yang dimaksud Kuyper perlu dipahami secara utuh sebagai bentuk pekerjaan Allah yang merupakan pihak yang berdaulat atas manusia. Sebab dalam regenerasi, Allah adalah pekerja tunggal, dan manusia bukanlah pihak yang mengusahakan, atau bahkan rekan kerja Allah (Kuyper, 1975). Regenerasi menjadi kondisi di mana manusia diciptakan kembali menjadi baru sesuai dengan gambaran Kristus, sehingga manusia didekatkan kepada Allah (Pangngaroan, 2024). Oleh karena itu, pandangan mengenai politik, harus dipahami sebagai ekspresi dari kehidupan yang sudah dibaharui dan dikerjakan oleh Allah dalam pribadi Roh Kudus. Sebab pandangan tersebut bukan lahir dari hasil refleksi moral atau juga rasionalitas manusia semata.

Menurut analisis penulis terdapat celah dari pemikiran yang dicetuskan oleh Kuyper. Yang pertama, regenerasi adalah proses personal, sehingga tidak dapat diterjemahkan menjadi etika berpolitik yang dapat diajarkan. Kedua, pandangan Kuyper mengenai politik tersebar dalam berbagai tulisan, karya, dan pidatonya di ruang publik dan belum tersusun sebagai teori yang sistematis (Kennedy, 2013). Ketiga, Kuyper tidak menguraikan pandangan itu dalam keragaman masyarakat yang demokratis, padahal itu diperlukan bila ingin diterapkan di Indonesia. Ketiga celah tersebut dapat dijembatani oleh PAK sebagai sarana persiapan untuk menghasilkan etika dalam berpolitik, tanpa menggantikan peran regenerasi, namun menghadirkan jalur sistematis agar pembaharuan rohani dapat terjadi.

Pemikiran Abraham Kuype lahir karena adanya konteks sosial-politik Belanda yaitu fenomena *Verzuiling*. *Verzuiling* merupakan peristiwa terbaginya masyarakat Belanda ke dalam beberapa blok ideologi, seperti Katolik, Sosialis, Calvinis, dan liberal (Baskwell, 2006). Ini menunjukkan adanya bukti adanya ragam politik yang secara tidak tertulis dari munculnya fenomena *Verzuiling*. Dimana pada masing-masing blok berdiri secara mandiri dan menghasilkan kehidupan kelompok yang mandiri, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan blok yang dianut (Baskwell, 2006). Struktur sosial seperti ini merupakan gambaran umum dan relevan dari penerapan *Sphere Sovereignty* dalam ranah sosial yang praktis, sebab hal tersebut menggambarkan semua bidang kehidupan tidak terikat satu dengan yang lain, namun semua berada dalam kedaulatan Allah dan setiap ranah dapat hidup berdampingan baik secara sosial kemanusiaan, politik, dan kehidupan rohani di Belanda.

Sebagai pertanyaan. Apakah model kehidupan seperti *Verzuiling* dapat diterapkan begitu saja di Indonesia? Perbandingan konteks menunjukan tiga perbedaan mendasar. Secara sosial, masyarakat Belanda di tahun 1920, memiliki kehidupan kelompok sosial relatif homogen, terutama dalam etnis keragaman masyarakat, sehingga pembelahnya adalah perbedaan ideologi dan agama (Colvin, 2017). Sedangkan Indonesia memiliki bentuk kehidupan yang sangat plural dalam keberagaman budaya, bahasa, agama, hingga suku bangsa yang ada (Sulistyawati, 2026). Dengan adanya irisan identitas kedaerahan tersebut, mengakibatkan struktur sosial yang ada di Indonesia tidak tersusun dalam bentuk blok ideologi, seperti yang diterapkan di Belanda dalam sistem *Verzuiling.*

Bukan hanya perbedaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, namun dalam konteks keagamaan Belanda dan Indonesia memiliki perbedaan. Blok kehidupan di Belanda memiliki akar tradisi Kristen dan ideologi sekuler yang berkembang karena Kekristenan, sedangkan di Indonesia agama Kristen menjadi minoritas dan perlu hidup berdampingan

.(Sulistyawati, 2026) Secara politik, Belanda memiliki kemandirian tiap kelompok sosial atau bahkan agama tanpa adanya gesekan antar blok masyarakat, sedangkan Indonesia berdiri dengan dasar Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai titik temu kehidupan lintas kelompok (Tjarsono, 2013). Oleh sebab itu, teori yang dikembangkan oleh Kuyper perlu di rekonstruksi terlebih dahulu, terutama jika berkaitan dengan pemikiran Kuyper yang membahas mengenai dinamika sosial-politik di Indonesia.

Selain itu, mengingat adanya perbedaan dasar yang berbeda, maka *Verzuiling* membutuhkan pertimbangan yang lebih dalam jika ingin diterapkan di Indonesia. Konsep kemandirian antar blok dalam konteks Indonesia bisa memperuncing sekat sosial dan menimbulkan masalah toleransi sama seperti di Eropa Barat dan Tengah masa itu (Nadzir, 2017) Dengan demikian, relevansi pemikiran Kuyper dalam hal prinsip yang tertuang dalam *Sphere Sovereignty* lebih tepat relevan bagi Indonesia untuk membatasi tiap ranah dan menghormatinya di bawah kedaulatan Allah, bukan *Verzuiling* yang mebagi masyarakat dalam blok yang mandiri. Sehingga penerapannya memerlukan kajian dan rekontruksi melalui PAK sebagai sarana membangun kesadaran politik yang aktif namun berlandaskan Pancasila, bukan dalam blok Kristen yang tertutup.

Rekonstruksi Pemikiran Kuyper Jika Diterapkan Di Indonesia

Berdasarkan celah dari pemikiran Kuyper diatas, maka diperlukan sebuah rekonstruksi jika pemikiran Kuyper ingin diterapkan di Indonesia. Rekonstruksi bertujuan untuk menghasilkan pemikiran yang lebih inklusif, adil, dan dapat diterapkan pada ruang yang lebih bebas (Meti, 2024). Bukan untuk mengganti fondasi teologis yang sudah ditentukan, namun hal ini diperlukan untuk mengkontekstualisasi prinsip-prinsipnya agar sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Supaya pemikiran Kuyper dapat diterapkan, namun tetap dengan memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pertimbangan yang perlu untuk diperhatikan adalah pandangan mengenai *Verzuiling.* Belanda dengan masyarakat yang homogen dapat, menerapkan dengan baik sistem *Verzuiling* yang berorientasi pada pembagian masyarakat dalam blok yang mandiri tanpa adanya perpecahan bangsa (Stuurman, 1985). Namun hal serupa belum tentu berhasil di Indonesia yang memiliki keragaman masyarakat lebih kaya, dengan 300 kelompok etnis dengan kebudayaan, bahasa, bahkan agama masing-masing (Antara & Yogantari, 2018). Sehingga, jika *Verzuiling* diterapkan secara mentah maka akan berpotensi memperuncing sekat sosial yang sudah ada.

Walaupun Kuyper bukan pencetus pandangan *Verzuiling,* namun Kuyper menjadi seorang tokoh penting dalam perkembangan fenomena ini. Posisinya sebagai seorang pemimpin partai anti-revolusi dan seorang tokoh yang mewakili gereja Reformed menunjukan praktik berpolitiknya tidak netral (Katianda, 2023). Apabila pendekatan itu diterapkan secara langsung di Indonesia, akan ada ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial dan politik. Sehingga penerapan pemikiran Kuyper bukan untuk pembentukan blok yang mandiri, namun prinsip bahwa setiap ranah kehidupan memiliki ranah masiang-masing dan berjalan berdampingan dengan Allah sebagai pribadi yang berdaulat atasnya.

Pertimbangan yang selanjutnya adalah prinsip *Sphere Sovereignty* dan relevansinya dengan kondisi di Indonesia. Falsafah negara Indonesia dengan berlandas Pancasila memuat sila Ketuhanan yang maha Esa, ini menjadi gambaran bahwa negara mengakui kehadiran

Tuhan dan hubungan-Nya dengan manusia dan berdaulat diatas mereka (Piter & Riyanto, 2024). Disamping itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadikan perbedaan dan kekayaan yang ada di Indonesia dapat menjadi suatu kesatuan yang memperkaya serta membangun negara (Nurhayati et al., 2021). Semangat dan prinsip negara Indonesia seperti ini sudah melihat keragaman sebagai sebuah hal yang berharga dan bukan ancaman. Dasar itu menjadikan persamaan pandangan negara dan *Sphere Sovereignty* berada dalam posisi yang sejajar. Sebab, *Sphere Sovereignty* menekankan kedaulatan Allah atas seluruh keberagaman ranah kehidupan manusia, dan didalamnya ada ranah pribadi yang perlu menghormati satu dengan yang lain (Irawati, 2023). Dengan demikian, pandangan Kuyper mendapat titik temu dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sehingga penerapan pandangan Kuyper bukan sebagai proses untuk memaksakan ideologi asing dan meruskan ideologi yang sudah ada, namun merupakan upaya penemuan prinsip yang selaras tanpa mengganti orientasi pusat kehidupan yaitu Allah.

Tapi pandangan mengenai *Sphere Sovereignty* perlu di pertajam dan perjelas kemana arah dan tujuan relasi antar ranah yang ada. Jika melihat kebutuhan dan keperluan di Indonesia, maka relasi antara keluarga, gereja, sekolah, dan negara yang menjadi tempat di mana prinsip ini di aplikasikan dan iman dapat berkembang (Kristianto & Salurante, 2021). Dari situ akan muncul iman Kristen yang melihat seluruh aspek kehidupan sebagai anugerah dari Allah, dan tidak hanya berhenti pada ritual keagamaan (Bishop, 2020). Sebab kehidupan anak muda bersentuhan erat dengan ranah-ranah tersebut, dan akan membantu mereka untuk membentuk kesadaran berpolitik yang sehat.

Dengan demikian, pendidikan agama Kristen menjadi sebagai ranah yang tepat untuk menjembatani teori teologi Kuyper dengan kebutuhan untuk berpolitik yang sehat di Indonesia. PAK merupakan ranah (*sphere*) tersendiri yang dapat menjalankan tanpa perlu dicampuri oleh kepentingan politik suatu golongan. Dengan otonomi yang dimiliki, menjadikan PAK dapat menjadi sarana untuk mengajarkan dan menumbuhkan kesadaran politik yang sehat, kritis, namun tetap berlandaskan pada iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, proses pendidikan tetap harus dilaksanakan dengan sengaja, namun tanpa menghilangkan dasar bahwa Allah adalah otoritas yang berdaulat.

Elaborasi Dasar Teologis Prinsip Pemikiran Kuyper Dalam PAK

Pemikiran Kuyper mengenai pendidikan memberikan dasar untuk membentuk kesadaran dalam berpolitik. Kuyper menekankan dalam *Sphere Sovereignty* bahwa setiap aspek kehidupan yang terpisah memiliki fungsi dan tujuan yang telah Allah tetapkan, sehingga pendidikan bukan lagi berbicara mengenai perkembangan kognitif, namun menjadi media pengenalan dan penghidupan nilai Kristen dalam hal keilmuan (Santoso & Puspitasari, 2023). Sehingga melalui pendidikan, peserta didik dapat mengerti adanya relasi antara manusia, Allah, dan dunia dalam bentuk aspek kehidupan terutama dalam hal sosial politik.

Pendidikan menjadi sarana yang praktis untuk membentuk orientasi hidup generasi muda. Sebab pendidikan yang diberikan oleh sekolah merupakan bentuk pendidikan yang tidak netral, karena negara meratakan dan merendahkan kepercayaan seseorang pada agama dengan semangatnya sendiri (Bishop, 2020). Hal ini memberikan pemahaman bahwa sekolah telah menjadi ruang pembentukan nilai dan keyakinan seorang peserta didik, sehingga pendidikan dapat dijalankan dengan maksud dan tujuan pribadi. Oleh sebab itu, Pendidikan Agama Kristen memiliki otonom untuk mengajarkan peserta didik untuk membangun pandangan dan

pengenalan kepada Allah sehingga manusia dapat hidup dengan kesadaran akan tangggung jawab bernegara.

Dengan konsep pemikiran tersebut, maka Pendidikan Agama Kristen dapat menjadi *Sphere Sovereignty* yang menjembatani etika politik dengan pandangan iman Kristen. *Sphere Sovereignty* dalam dunia pendidikan dapat mengubah sistem pedagogis dalam ruang lingkup kelas, menjadi hal praktis terutama dalam dunia politik, sebab iman memiliki implikasi dalam ruang publik (Kennedy, 2013). Sehingga, pandangan dalam dunia politik yang diharapkan lahir dari proses spontan regenerasi, dapat timbul melalui proses yang sistematis dalam sebuah kegiatan mengajar-belajar. Dengan demikian, Pendidikan Agama Kristen dapat menjadi sarana penghubung antara pengalaman pribadi dengan Allah dan kesadaran berpolitik yang sehat.

Karya Allah melalui regenerasi, dan peran manusia dalam pendidikan sebeneranya dapat dijelaskan dalam konsep anugerah umum milik Kuyper. Anugerah umum merupakan kasih Allah bagi seluruh manusia untuk dapat berfikir, berbudaya, dan membangun sebuah peradaban (Un, 2016). Anugerah ini merupakan bentuk respon dari anugerah khusus yang hanya dikerjakan oleh Allah untuk melahirkan manusia baru sesuai dengan kehendak-Nya (Telaumbanua, 2025). Dari hal tersebut menunjukan bahwa regenerasi dan pendidikan bukan hal yang bertentangan namun saling melengkapi. Di mana regenerasi mentransformasikan manusia dari karya Allah secara langsung, namun pendidikan adalah sarana Allah untuk mengembangkan kehidupan manusia sesuai tujuan-Nya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, hubungan Allah dengan manusia dalam regenerasi dan pendidikan memiliki porsi yang proporsional. Pendidikan agama Kristen tidak dapat menghasilkan pembaharuan, namun pendidikan mempersiapkan benih yang akan ditumbuhkan oleh Roh Kudus bertumbuh dan menghasilkan buah yang nyata dalam tindakan berpolitik (Setiawan & Arifianto, 2021). Dengan demikian, elaborasi pemikiran Abraham Kuyper ke dunia pendidikan di Indonesia memiliki dasar teologis yang kuat, sebab pendidikan merupakan anugerah umum yang membantu manusia untuk dapat memahami regenerasi yang diberikan oleh Allah.

Elaborasi ini tidak menjadikan PAK sebagai pengganti regenerasi sebagai karya Allah bagi manusia, namun menjadi sarana untuk bertumbuhnya kesadaran politik yang terarah. Pendidikan menjadi sebuah sarana untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam pembaharuan iman yang nyata dan berdampak bagi sekitar (Kasingku & Lotulung, 2024). Iman yang tidak hanya menjadi pengalaman pribadi, namun juga dapat menjadi sebuah dasar bagi seseorang dapat bertanggung jawab dalam menjalani tugas sebagai warga negara. Oleh sebab itu, tindakan politik peserta didik dapat dibekali supaya tetap sejalan dengan iman Kristen, dan menjadikan dunia politik sebagai *sphere* yang dapat memuliakan nama Allah.

Pengembangan Pandangan Kuyper Dalam Pendidikan Agama Kristen

Gagasan yang dikemukakan oleh Kuyper bukanlah pemikiran yang berdiri sendiri, namun berakar pada pandangan teologis akan kedaulatan Allah. Pandangan teologis tersebut dikembangkan oleh Kuyper karena berangkat dari kesaksian dalam Perjanjian Lama, serta pengajaran Yesus akan pemerintahan (Irawati, 2023). Dalam konteks Indonesia, Dr. Leimena menjadi tokoh yang memberikan contoh tentang integritas iman Kristen di tengah kehidupan politik (Latuihamallo, 2022). Hal ini menunjukan bahwa kesadaran berpolitik tidak berbicara

tentang kekuasaan semata, namun kesadaran etis akan pengenalan tentang Allah yang berkuasa penuh diatas seluruh ranah kehidupan manusia.

Karena pemahaman tersebut, pandangan Kuyper dapat dikembangkan dalam ranah Pendidikan Agama Kristen supaya peserta didik memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial mereka. Hal yang dapat dikembangkan pertama adalah kesadaran politik yang sehat perlu bersifat partisipatif tapi tidak absolut. Hal tersebut telah di contohkan oleh Daniel saat dia berada dibangku kekuasaan asing, namun tidak mengorbankan ketaatan tertinggi kepada Allah (Lumintang & Lumintang, 2026). Hal tersebut memberikan gambaran jika politik merupakan *sphere* yang berdiri sejajar dengan ranah yang lain, sehingga kekuasaan politik bukanlah otoritas tertinggi dalam kehidupan.

Karena ranah politik bukan hal yang absolut, setiap kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki perlu dipahami sebagai amanat yang perlu di pertanggung jawabkan pada Allah. Oleh sebab itu, orang Kristen dipanggil untuk menempatkan ranah politik dibawah kekuasaan Allah tanpa menghilangkan hati nurani dan integrasi iman (Intan, 2022). Namun, kesalahan pandangan kerapkali menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika menyinggung tokoh Kristen yang berkecimpung di dunia politik. Hal tersebut terjadi disaat ranah politik dipandang sebagai ranah yang berdaulat penuh diatas kehidupan manusia, dan tidak terikat pada otoritas yang lebih tinggi yaitu kedaulatan Allah.

Yang selanjutnya, kesadaran berpolitik perlu diwujudkan dalam sikap yang kritis dan konsturktif. Hal tersebut sejalan dengan prinsip nabi Elia yang berani menegur raja karena kesalahan yang telah dibuatnya, tanpa menolak institusi kerajaan yang merupakan ranah yang sudah Allah tetapkan (Sarungallo & Sihombing, 2019). Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, *Sphere Sovereignty* membantu peserta didik dapat meilhat setiap sistem, kebijakan, program, serta keputusan politik perlu dilihat dan dinilai dalam kerangka etis Kristen. Oleh sebab itu, penilaian tersebut perlu dilakukan bukan dengan sikap yang apatis, namun juga bukan dengan sikap yang menggangap bahwa politik berkuasa penuh atas segalanya.

Pendidikan Agama Kristen juga perlu untuk membentuk kemampuan peserta didik untuk memberikan kritik yang sehat. Politik tidak hanya perlu dijalankan secara aktif, namun juga diperlukannya sebuah kesediaan untuk mengevaluasi sebuah program yang pemerintah kerjakan tanpa perlu menjatuhkan dan menghilangkan kedudukan pemerintahan (Pakpahan & Marbun, 2024). Dengan demikian, Pendidikan Agama Kristen memberikan bekal kepada generasi muda supaya tidak hanya sekedar mengikuti tradisi politik para pendahulunya, namun menjadikan mereka warga negara yang mampu menjaga otoritas politik dalam batas yang telah ditetapkan oleh Allah.

Kesadaran berpolitik yang sehat juga perlu dilaksanakan secara lintas ranah dan kolaboratif. Prinsip tersebut berangkat dari konsep *Sphere Sovereignty* yang melihat keragaman ranah kehidupan berjalan dibawah kedaulatan Allah (Kristianto & Salurante, 2021). Dalam konteks Indonesia yang plural, maka *Venzuiling* yang berpaku pada sistem blok tidak dapat diterapkan secara utuh, namun perlu disesuaikan dengan mengembangkan kerja sama antar kelompok. Pendekatan itu berangkat dari keterlibatan tokoh Kristen yang berperan di ranah politik tanpa menjadikan agama sebagai topeng politik. Dengan demikian, Pendidikan Agama Kristen yang merupakan *sphere* dapat melihat keberagaman sebagai ranah yang dimiliki oleh Allah secara utuh.

Pendidikan Agama Kristen juga perlu untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang aktif dalam kehidupan yang majemuk dengan menghormati batas tiap ranah. Kehidupan politik orang Kristen tidak diarahkan untuk mendominasi kelompok lain, namun mengupayakan kemajuan bangsa dan keadilan masyarakat (Mau, 2023). Sehingga kesadaran akan ranah kehidupan majemuk tidak berdiri dominan antara satu dengan yang lain, namun hidup selaras dan berdampingan. Pada akhirnya, Pendidikan Agama Kristen mampu menciptakan peserta didik yang dapat hidup dalam ranah Indonesia yang plural, dan memandang Allah sebagai pemilik dan penguasa mutlak setiap ranah.

Ketiga prinsip yang sudah dikemukakan diatas perlu untuk diwujdukan melalui empat ranah yang sejalan dengan pemikiran Kuyper, yaitu keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat. Setiap ranah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan tidak saling menggantikan, namun tetap bekerja ke arah yang sama yaitu untuk membangun kesadaran politik yang sehat. Ranah pertama adalah keluarga, dimana orang tua berperan untuk mengajarkan sejak mereka kanak-kanak bahwa seluruh ranah kehidupan termasuk politik, berada pada kedaulatan Allah (Berasa et al., 2025). Dengan demikian, Pendidikan Agama Kristen di dalam keluarga akan mampu menciptakan anak yang dapat patuh pada perintah Allah, namun tetap menciptakan ruang dialog agar tetap melahirkan ruang beripikir kritis untuk segala seustau yang terjadi.

Selain itu, gereja juga berperan melalui pengajaran dan pemuridan. Gereja perlu secara nyata membahasa mengenai etika politik yang berlandaskan pada Firman Tuhan supaya lahir integritas iman dalam berpolitik (Petonengan et al., 2024). Sehingga menegaskan bahwa jemaat gereja boleh untuk terlibat dalam dunia politik, namun tetap dalam kedaulatan Allah, serta mendampingi jemaat supaya tidak menjadi alat politik praktis. Sedangkan sekolah berperan melalui kurikulum yang dikembangkan untuk membahas ranah politik yang tetap dapat diuraikan dan diteliti secara ilmiah (Simanjuntak et al., 2026). Jika tingkatan ini dilaksanakan, maka kesadaran politik tidak muncul dari regenerasi saja, namun dapat ditumbuhkan secara sistematis melalui pendidikan.

Sedangkan masyarakat menjadi ruang praktik dari hasil pembentukan yang dilakukan oleh ketiga ranah tersebut. Yang mana peserta didik dapat terjun ke dalam masyarakat untuk melakukan pelayanan sosial, kerjasama antar kelompok, atau bahkan berdampak bagi lingkungan dengan menggunakan Pancasila sebagai titik temu (Simanjuntak et al., 2026). Di ruang masyarakatlah pandangan berpolitik di uji dengan mempertahankan sikap toleransi, namun tidak membuat blok Kristen yang tertutup dari lingkungan. Dengan demikian, keluarga memeberikan dasar, gereja memperdalam dari segi teologis, sekolah membuatnya menjadi sistematis, dan masyarakat menjadi ruang praktik. Jika keempat ranah ini dapat berjalan, maka pembentukan kesadaran berpolitik yang sehat di Indonesia dapat mulai dilakukan.

Kesadaran Berpolitik Yang Sehat Di Indonesia

Penyalahgunaan kekuasaan, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Jika di tinjau dari sudut pandang *Sphere Sovereignty,* maka hal tersebut terjadi akibat manusia melampaui kedaulatan yang Tuhan sudah berikan. Saat ranah politik sudah digunakan secara mutlak tanpa mempedulikan ranah lain, terutama kedaulatan Allah, maka itu menjadi akar persoalan yang sebenarnya (Rathbone, 2015). Sehingga, ranah politik tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab yang Allah percayakan

(Arifianto & Ngesthi, 2023), namun sebagai panggung untuk saling menguasai satu dengan yang lain untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Persoalan yang menjadi fenomena tersebut bukan sebatas pelanggaran moral, namun merupakan persoalan teologis yang lebih serius. Ketiadaan penundukan diri pada otoritas Allah mengakibatkan hilangnya penghormatan pada setiap ranah kehidupan (Un, 2020). Dengan demikian, batas kekuasaan dapat dilanggar dan kesadaran berpolitik menjadi tumpul. Dari hal tersebut maka, pengembangan pandangan Kuyper bukan sekedar konsep yang dirancang secara sistematis, melainkan sebuah tawaran yang kongkret atas persoalan yang tengah marak dialami di Indonesia.

Berangkat dari persoalan sosial dan politik Indonesia yang majemuk, maka kesadaran berpolitik yang sehat menjadi sebuah hal yang penting untuk diterapkan. Politik yang hidup dalam ruang yang plural tidak berbicara hanya sebatas perebutan kekuasaan, namun juga menyangkut kebebasan masyarakat untuk bersuara, menyikapi perbedaan, dan keadilan sosial (Gulo & Mendrofa, 2025). Sehingga dari keberagaman yang ada, setiap ranah dapat hidup bukan untuk dirinya sendiri, namun dapat hidup saling berdampingan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, maka keberagaman bukan lagi dianggap sebagai suatu celah yang dapat memecah belah bangsa, namun itu merupakan sebuah kekayaan yang dapat digunakan untuk memperkuat bangsa.

Kehidupan yang plural juga kadang menimbulkan sebuah dilema dalam kehidupan politik masyarakat. Perbedaan pandangan politik mengenai tokoh politik, partai, atau bahkan kelompok tertentu kadang membawa kepada permusuhan sosial (Rianadiwa et al., 2024). Namun, kebebasan tersebut perlu memiliki batas etis yang tetap harus diperhatikan. Ranah politik tidak boleh mengambil alih persaudaraan, kebersamaan, serta kekeluargaan hanya karena perbedaan pandangan politik. Sebab, pandangan pribadi bukanlah ukuran untuk memandang kehidupan seseorang, tapi penilaian tersebut haruslah berangkat dari penghargaan terhadap kebebasan manusia dan kepentingan bersama.

Selain itu, kemunculan berita hoax, propaganda, penggiring opini, dan konten negatif menjadi semakin marak di Indonesia. Warga negara yang bijak adalah mereka yang dapat memilah dan memilih informasi apa yang mereka dapat dan terima (Khairunisa et al., 2024). Kemudian informasi tersebut dapat di telaah untuk di kritisi, namun bukan untuk di serang secara pribadi. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Sehingga, kesadaran politik yang sehat dapat melahirkan warga negara yang kritis terhadap segala bentuk informasi, namun tetap berlaku etis dan rasional demi kepentingan bangsa. Sehingga gereja dan warga negara menjaga nama baik gereja untuk tidak masuk dalam kejahatan politik (Arifianto, 2024). Kemunculan politik identitas yang mengatas namakan suku, bangsa, ras, dan agama juga menjadi persoalan yang perlu di hadapi. Identitas kelompok tidaklah lebih tinggi dan lebih penting dari kepentingan bangsa (Mutiara, 2022). Sehingga kebijakan politik juga sangat perlu untuk mementingkan kepentingan seluruh golongan kelompok tanpa memberatkan salah satunya. Dengan adanya kesadaran politik yang sehat, maka diharapkan masyarakat dapat hidup untuk saling bekerjasama dengan melampaui sekat perbedaan identitas. Tapi, identitas tersebut tidak perlu dihilangkan, namun ditempatkan dalam ranah pribadi yang dapat menghormati ranah yang lain. Sehingga, perbedaan identitas tidak lagi menjadi penghalang unruk terciptanya kehidupan yang adil dan damai.

Persoalan-persoalan yang terjadi diatas bukan hanya terjadi dalam kehidupan umum, namun juga kerap ditemukan dalam kehidupan bergereja. Gereja perlu untuk menegaskan bahwa jemaat gereja boleh terlibat dalam politik, namun tidak menjadikan itu sebagai hal yang berdaulat penuh dan menggantikan Allah (Rerung & Attu, 2023). Sebab saat terjun kedalam dunia politik, maka integritas iman perlu dipertahankan sama seperti tokoh pergerakan bangsa Indonesia (Shindang et al., 2023). Dengan demikian, gereja menjadi tempat yang dapat mengembangkan kesadaran bepolitik jemaat dengan landasan teologis. Sehingga saat orang Kristen masuk kedalam dunia politik, mereka dapat menjadi terang dan garam bagi bangsa Indonesia.

Saat ranah politik dapat dipandang dengan sehat, maka ranah politik dapat menjadi berkat bagi kehidupan bangsa. Sebab kesadaran berpolitik tidak lahir secara instan, namun melalui proses yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan terutama melalui pendidikan. Pendidikan tersebut dapat digunakan sebagai jembatan antara iman dengan ranah kehidupan terutama ranah politik. Dengan demikian, kesdaran berpolitik yang sehat bukan sekedar tujuan praktis, melainkan sebuah sarana untuk menghadirkan iman, tanggung jawab, dan kebersamaan di negara Indonesia.

KESIMPULAN

Hasil penelitian kali ini menunjukan bahwa teori *Sphere Sovereignty* Kuyper memiliki kelebihan yang menegaskan bahwa hanya Allah saja yang berdaulat penuh dan memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan. Jika hal tersebut direkontruksi kedalam politik Indonesia, maka akan menjadi jawaban bagi permasalahan politik yang ada. Selain itu, pandangan Kuyper nyata nya selaras dengan bentuk pemerintahan Indonesia yaitu republik, dan sejalan dengan dasar negara Indonesia, yang tertuang dalam sila pertama. Walau demikian, teori Kuyper tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia, sebab *Verzuiling* yang muncul di Belanda memiliki lingkungan yang homogen, dan bertolak belakang dengan Indonesia yang memiliki lingkungan plural. Karena itu, prinsip tersebut perlu direkontruksi supaya tidak menciptakan blok-blok mandiri, namun berdiri berdampingan dan tunduk pada otoritas Allah.

Oleh sebab itu, Pendidikan Agama Kristen yang merupakan *sphere* dapat dirumuskan sebagai jembatan yang menghubungkan regenerasi yang merupkan karya Allah dengan pembentukan kesadaran berpolitik yang sehat. Pendidikan Agama Kristen tidak menggantikan regenerasi, namun menjadi wadah sistematis untuk menyiapkan benih yang kelak dibuahi oleh Roh Kudus. Yang mana pendidikan akan diberikan melalui orang tua, gereja, dan sekolah, sehingga peserta didik dapat dibentuk menjadi seorang warga negara yang partisipatif tetapi tidak absolut, kritis secara konstruktif, dan kolaboratif lintas ranah dalam masyarakat yang plural. Kelebihan tulisan ini terletak pada elaborasi dari pemikiran Kuyper dengan Pendidikan Agama Kristen yang bukan hanya sebuah tawaran konseptual, namun merupakan sebuah langkah pasti. Sehingga dapat melahirkan generasi Kristen yang menjadikan iman sebagai dasar dalam kehidupan bernegara, menghargai keberagaman, sekaligus bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif. *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, *1*.

Arifianto, Y. A. (2024). Melawan Money Politics dalam Elektoral: Upaya Mereduksi Kejahatan Politik Masuk Gereja. *KHAMISYIM: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, *1*(1), 1–14. https://doi.org/10.71415/jkmy.v1i1.1

Arifianto, Y. A., & Ngesthi, Y. S. E. (2023). Aktualisasi Pemimpin Gereja menjaga Moral dan Integritas Umat dalam Menghadapi Tahun Politik. *Jurnal Salvation*, *4*(1), 60–71.

Baskwell, P. (2006). Kuyper and Apartheid: A Revisiting. *HTS Theological Studies*, *62*(4), 1269–1290. https://doi.org/10.4102/hts.v62i4.401

Berasa, T., Sitorus, R., Sihombing, V., Sijabat, S., & Lafau, B. (2025). Peran Pendidikan Agama Kristen Dewasa terhadap Keluarga Kristen. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, *4*(1), 994–1000.

Bishop, S. (2020). Abraham Kuyper: Cultural Transformer. *Foundations*, *79*, 60–76.

Colvin, C. L. (2017). Banking on a Religious Divide: Accounting for the Success of the Netherlands' Raiffeisen Cooperatives in the Crisis of the 1920s. *The Journal of Economic History*, *77*(3), 866–919.

Djoys Anake Rantung. (2017). Pendidikan Agama Kristen dan Politik dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk di Indonesia. *Jurnal Shanan*.

Gulo, L. P. I., & Mendrofa, E. A. Y. (2025). Hak untuk Bersuara, Kewajiban untuk Berpartisipasi: Makna Demokrasi Sesungguhnya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, *2*(2), 120–126.

Hakh, S. B. (2018). Peranan Orang Kristen Dalam Pusaran Politik Di Indonesia (Suatu Tinjauan Historis-Teologis). *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama*, *2*(1).

Intan, B. F. (2022). Kuyper's Sphere Sovereignty and the Restriction on Building Worship Places in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, *78*(1), 7309.

Irawati, C. W. (2023). Sumbangsi Teologi Abraham Kuyper Bagi Keadilan Sosial Di Indonesia: Sebuah Refleksi Iman Kristen. *Didache: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, *5*(1), 50–66.

Kasingku, J. D., & Lotulung, M. S. D. (2024). Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, *10*(1), 331–339.

Katianda, S. T. (2023). Abraham Kuyper Dan Pluralitas: Pergulatan Peran Kristiani Di Tengah Keberagaman Negara Pancasila. *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kerusso*, *8*(1), 30–43.

Kennedy, S. P. (2013). Abraham Kuyper and His Political Philosophy: Calvinist and Pluralist. *Reformed Theological Review*, *72*(2), 73–85.

Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa, D., & Rahmat, R. (2024). Membangun Keadaban Digitalisasi Warga Negara Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, *4*(1), 1–8.

Kristianto, D., & Salurante, T. (2021). Iman Kristen Dan Ranah Publik: Sketsa Pemikiran Abraham Kuyper. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, *5*(1), 38–48.

Kuyper, A. (1898). *Lectures on Calvinism*. Eerdmans Publishing Company.

Kuyper, A. (1975). *The Work of the Holy Spirit* (Reprint). Wm. B. Eerdmans.

Kuyper, A., Ballor, J. J., & Flikkema, M. (2015). *Our Program: A Christian Political Manifesto*. Lexham Press.

Latuihamallo, Y. (2022). Kisah Hidup dan Pengabdian Yohannes Leimena: Berpusat pada Kristus, Berdampak bagi Bangsa. *THEOLOGIA INSANI: Jurnal Theologia, Pendidikan, Dan Misiologia Integratif*, *1*(2), 181–202.

Lumintang, S. A., & Lumintang, S. F. (2026). Theokrasi dalam Kitab Daniel dan Relevansinya dengan Karakter Kepemimpinan Modern. *Predica Verbum: Jurnal Teologi Dan Misi*, *6*(1), 63–81.

Malino, Y., Supratikno, A., & Ludji, I. (2024). Agama Dan Etika Politik: Peran Gereja dalam Diskursus Etika Politik Era Reformasi. *Dunamis : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, *9*(2), 684–705. https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1472

Mau, M. (2023). Christian Education and Political Education for Christians in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)*, *3*(2), 17–34.

Meti, A. P. (2024). *Rekonstruksi Misi Kristen Dalam Dunia Pendidikan Matius 28:19: Mendaratkan Konsep Pendidikan Yang Membebaskan Paulo Freire Bagi Misi Pendidikan Masa Kini*.

Mutiara, M. (2022). Politik Identitas di Indonesia antara Nasionalisme dan Agama. *Mandar: Social Science Journal*, *1*(2), 100–105.

Nadzir, I. (2017). Kasus Multikulturalisme Belanda sebagai Kritik atas Utopia Multikulturalisme Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, *37*(2), 25–46.

Nurhayati, N., Setiyowati, R., & Nurmalisa, Y. (2021). Bhinneka Tunggal Ika As A National Consensus And A Universal Tool Of The Indonesian Nation. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, *6*(2), 254–263. https://doi.org/10.26618/jed.v6i2.5317

Pakpahan, M., & Marbun, R. C. (2024). Ketaatan Kepada Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, *7*(4), 18753–18760.

Pangngaroan, A. (2024). Regenerasi Monergisitik Sebagai Bentuk Kedaulatan Mutlak Allah dalam Kelahiran Baru Orang Percaya: Kajian Teologis Yohanes 3:1-8. *Student Evangelical Journal Aiming At Theological Interpretation*, *1*(2), 129–141. https://doi.org/10.69668/kk7mcm64

Petonengan, G. S., Taidi, A. I., Takalamingan, L. I., & Metusala, Y. (2024). Kajian Teologis Gereja dan Politik: Analisis Transformasi Hubungan dan Keterlibatan Kontemporer. *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual*, *1*(1), 43–57.

Piter, R., & Riyanto, F. X. E. A. (2024). Memahami Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" Pancasila Dalam Perspektif Filsafat Gabriel Marcel. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1–13.

Rathbone, M. (2015). Sphere Sovereignty and Irreducibility: The Ambiguous Use of Abraham Kuyper's Ideas During the Time of Apartheid in South Africa. *Koers: Bulletin for Christian Scholarship*, *80*(1), 1–8.

Rerung, A. E., & Attu, J. (2023). Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale. *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen Dan Pemberdayaan Jemaat*, *4*(1), 1–17.

Rianadiwa, S., Solakhudin, F., Salam, V. T., & Rahmawati, N. (2024). Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, *4*(1), 69–179.

Santoso, E., & Puspitasari, D. (2023). Analisis Pemikiran Abraham Kuyper Dan Implementasinya Pada Pendidikan Kristen Masa Kini. *Aletheia Christian Educators Journal*, *4*(2), 41–46.

Sarungallo, R. R., & Sihombing, R. U. (2019). Tinjauan Teologis Integritas Elia. *Kerusso*, *4*(1), 26–33.

Setiawan, H., & Arifianto, Y. A. (2021). *Konstruksi Kerangka Konseptual Peranan Roh Kudus dalam PAK Menggunakan Taksonomi Bloom yang Diperbarui*.

Shindang, D. L., Ruhulessin, J. C., & Damamain, J. (2023). Jalan Spiritualitas Johannes Leimena dan Implikasinya bagi Pelayanan Sosial Gereja: Suatu Kajian Spiritualitas Kristen dengan Pendekatan Hermeneutik Fenomenologi. *KURIOS*, *10*(2), 430–442.

Siahaan, J. M. (2025). Korupsi dan Moralitas: Tinjauan Teologis terhadap Fenomena Frekuensi dan Eskalasi Nilai Korupsi di Indonesia. *Jurnal Teologi Biblika*, *10*(1), 15–24.

Simanjuntak, F., Larosa, S., Walean, R. R., & Panggabean, J. R. (2026). Analisis Peran Pendidikan Agama Kristen (PAK) Dalam Menangkal Intoleransi Berbasis Kepentingan Politik. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, *7*(2), 906–915.

Stuurman, S. (1985). Verzuiling, geschiedenis en politiek. *BMGN-Low Countries Historical Review*, *100*(1), 70–77.

Sulistyawati, S. M. (2026). Pancasila dan Pluralisme Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, *4*(3), 224–231.

Telaumbanua, D. (2025). Anugerah Umum: Sebuah Usulan Integrasi Iman dan Ilmu Menurut Abraham Kuyper. *Artes Liberales: Journal of Humanities Studies*, *2*(1), 18–30.

Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Jurnal Transnasional*, *4*(2), 881–894.

Un, A. S. (2016). Calvinisme dan Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis terhadap Pemikiran Abraham Kuyper. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, *3*(1), 35.

Un, A. S. (2020). Sphere Sovereignty According to Kuyper. *Unio Cum Christo, International Journal of Reformed Theology and Life*, *6*(2), 97–114.

van Vlastuin, W. (2021). Kuyper's Spirituality in Its Calvin-Context. *Church History and Religious Culture*, *101*(4), 526–545. https://doi.org/10.1163/18712428-bja10032

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.